

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BUMDes dilandasi oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau harsana desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDesa mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perkembangannya. Sejumlah 2 BUMDesa dari seluruh BUMDesa yang ada di Kecamatan Rambah dinyatakan tidak sehat, sebagian dari BUMDesa tersebut diambang kebangkrutan. BUMDesa yang tidak sehat dan bahkan mengalami kebangkrutan penyebab utamanya pada kecurangan pengelolaan keuangan yang diduga karena lemahnya sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia BUMDesa masih rendah. Selain itu terjadi kasus di BUMDesa yang berkaitan dengan Simpan Pinjam berupa penggelapan uang. BUMDesa di Kecamatan Rambah terdapat 14 BUMDesa yang tersebar di beberapa desa di wilayah Kecamatan Rambah, di antaranya 12 BUMDesa yang termasuk kategori masih aktif dan 2 BUMDesa yang sudah non aktif.

Kondisi 2 BUMDesa yang mengalami non aktif menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan BUMDesa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada BUMDesa harus menekan pada kualitas pembukuan atau laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMDesa sangat penting untuk menghindari resiko kerugian BUMDesa akibat kecurangan oknum anggota BUMDesa.

Kecurangan merupakan sebuah tindakan yang sengaja dilakukan demi kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Kecenderungan kecurangan yang terjadi pada BUMDes dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal.

Menurut Susanto (2015:8), pengendalian intern yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Sejalan dengan pendapat itu, Wilopo (2016:45) menyebutkan bahwa pengendalian intern sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Komponen penting dari pengendalian intern akuntansi antara lain: (1) sistem prosedur akuntansi, (2) otorisasi, (3) formulir, dokumen, dan catatan, dan (4) pemisahan tugas (Mahmudi, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah ketaatan aturan akuntansi. Menurut Rahmawati (2018) laporan keuangan yang tidak sesuai ataupun yang tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku dapat menimbulkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Menurut Alpinista (2013), Persepsi pegawai terhadap ketaatan aturan akuntansi akan berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Sedangkan penelitian Kusumastuti (2012) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara faktor ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah penegakan hukum. Riski dan Aida (2017), menyatakan bahwa tingkat penegakan hukum yang tinggi akan menyebabkan semakin kecil kemungkinan pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi, namun sebaliknya penegakan hukum rendah mengakibatkan pegawai tersebut cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian Riski dan Aida (2017) menyimpulkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan Rifqi (2013) dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi di sector pemerintahan.

Penelitian-penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi memberikan hasil yang tidak konsisten. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, namun dalam penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai faktor intervening. Faktor tersebut akan bertindak sebagai variabel intervening dalam hubungannya dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDesa. Faktor intervening dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Digunakannya komitmen organisasi dalam penelitian ini, disebabkan karena komitmen organisasi mampu mempengaruhi setiap individu untuk memiliki komitmen pada dirinya untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, sehingga adanya komitmen yang tinggi dalam setiap pegawai untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan perilaku etis yang dapat mengurangi kecurangan akuntansi (Kurniawan, 2018).

Salah satu contoh kasus kecurangan pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu adalah adanya dugaan penyelewengan pengelolaan dana BUMDesa Makmur Sejahtera, Desa Kepenuhan Raya, Kecamatan Kepenuhan sejak 2013 hingga 2018 dengan indikasi dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 857.902.000. Hal ini terdapat dalam laporan Gerak Rokan Hulu dengan nomor surat 087/LP/A.G-RH/A.1/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022 (Metroterkini.com, 2022).

Kasus lainnya yaitu di Kecamatan Rokan IV Koto di kabupaten Rokan Hulu yaitu diantaranya : mantan Kepala Desa Alahan periode tahun 2011 hingga 2017 dan Bendahara Desa Alahan tahun 2017. Adanya dugaan korupsi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran SILPA Tahun Anggaran (TA) 2016, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Alahan TA 2017. (sumber : harianhaluan.com).

Kasus lainnya yaitu Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melaporkan dugaan kerugiaan keuangan negara terhadap realisasi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dugaan penyimpangan pengelolaan kekayaan asli desa (kebun desa) dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul) pada Senin 14 November 2022. (sumber : kupaskasus.com).

Selanjutnya Eks Kepala Desa (Kades) Alahan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dan Bendahara dinyatakan bersalah melakukan korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Alahan TA.2017 sebesar Rp1.498.383.400. (sumber : cakaplah.com).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lebih lanjut mengenai smetode penilaian akuntansi persediaan dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Dengan Komitmen Sebagai Intervening (Studi Kasus pada BUMDes di Kecamatan Rambah)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

3. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap komitmen organisasi?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap komitmen organisasi?
6. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap komitmen organisasi?
7. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening?
8. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening?
9. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening?
10. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap internal terhadap komitmen organisasi.

2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap komitmen organisasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap komitmen organisasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.
6. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan laporan keuangan BUMDes.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan

akuntansi pada pengelolaan laporan keuangan BUMDes, sehingga hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi pihak manajemen BUMDes untuk menghindari terjadinya kecurangan.

3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai intervening pada BUMDesa di Kecamatan Rambah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pada penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan penegakan hukum.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Fitri (2020), dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening". Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada variabel bebas dan objek penelitian serta lokasi yang digunakan.

Pada penelitian Fitri (2020) menjadikan OPD di Kabupaten Bengkalis sebagai objek dan lokasi penelitiannya, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan objek dan lokasi penelitiannya adalah BUMDes di Kecamatan Rambah. Selain itu pada penelitian Fitri (2020) menggunakan 4 variabel bebas sebagai faktor-

faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya menggunakan 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang lokasi, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pemabahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat dari hasil dan saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teori

2.1.1. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan (Amanina, 2018:23).

Menurut Mulyadi (2017:180), defenisi sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Romney dan Steibart (2017:23) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan.

Menurut Boyton dan Johnson (2018:12) sistem pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

2.1.2. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Menurut Levany (2018:23) untuk dapat mencapai tujuan sistem pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

1. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidak beresan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada

2.1.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Boyton dan Johnson (2017:13) mengidentifikasi lima unsur yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environment*

Adalah menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Adalah identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Fitri (2020) yang mengemukakan ada lima unsur (komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian inter, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Peilaian resiko adalah identifikasi entitas dan analisi terhadap resiko yang relevan unutk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktifitas pengendalian (*Control activities*)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.1.4. Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut KBBI, aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah diterapkan supaya dituruti atau dilakukan. Setiap instansi memiliki peraturan yang menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan suatu kegiatan. Kusumastuti (2019) menyatakan bahwa aturan akuntansi mengatur tentang pelaporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting bagi investor dan manajemen sehingga harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Menurut Shintadevi (2019) ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketaatan peraturan akuntansi merupakan suatu sikap patuh kepada segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan

keuangan yang dihasilkan efektif , handal serta akurat informasinya. Adanya peraturan akuntansi di dalam organisasi menghindari tindakan kecenderungan kecurangan atau fraud yang mana hal itu dapat merugikan organisasi.

2.1.5. Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundangundangan.
2. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

2.1.6. Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Thoyibatun, 2009 dalam Fitri (2020) indikator-indikator ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

1. Persyaratan pengungkapan
2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan public
3. Objektif

Adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain.

4. Memenuhi syarat kehati-hatian

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

2.1.7. Penegakan Hukum

Menurut Wilopo (2008) dalam Ida Ayu Alit Oktaviani (2017), penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum yang berlaku di suatu Negara. Satjipto Raharjo (2000) dalam Ida Ayu Alit Oktaviani (2017) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983) dalam Ida Ayu Alit Oktaviani (2017) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam

sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo (2007 : 142-143 dalam Ida Ayu Alit Oktaviani (2017) berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan merupakan suatu proses dilakukannya upaya teganya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain, 2013 dalam Fitri, 2020).

Penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat bekerja selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki tanggungjawab yang juga bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian peraturan dan kemanfaatan sosial

menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum (Rahardjo, 2009 dalam I Komang Arthana, 2019).

Semua peraturan yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur, yaitu perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang, akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau yang melanggar peraturan, cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai peraturan tersebut (Arikunto, 1990 dalam I Komang Arthana, 2019).

2.1.8. Indikator Penegakan Hukum

Rifqi (2013) dalam Fitri (2020), menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur penegakan hukum yang dilakukan yaitu:

1. Ketaatan terhadap perundang-undangan
2. Proses penegakan hukum
3. Tanggung jawab

2.1.9. Komitmen Organisasi

Robbins & Judge (2018:100) mendefinisikan komitmen organisasi adalah Suatu keadaan seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta bertujuan dan keinginannya untuk dapat mempertahankan diri menjadi anggota dalam organisasi. Menurut pengutipan diatas bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan dalam diri pegawai untuk dapat menjadi salah satu keluarga didalam suatu organisasi dan berupaya untuk dapat menjadi yang terunggul didalam tujuan organisasi.

Sopiah (2018:156), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu daya yang relatif dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang pegawai terhadap

suatu organisasi. Tujuan lain komitmen organisasi adalah sikap yang memahami loyalitas pekerjaan terhadap organisasi dan termasuk proses yang berkepanjangan dari anggota organisasi untuk dapat menyampaikan semua kepeduliannya pada suatu organisasi juga hal tersebut bersambung pada keberhasilan dan ketentraman kerja.

Lambert *et al.* (2019:81-82) mendefinisikan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu obligasi untuk seluruh bagian organisasi, dan tidak untuk suatu pekerjaan, kelompok dalam kerja, dan keyakinan akan pentingnya pekerjaan itu bagi dirinya sendiri". Menurut pengutipan diatas bahwa komitmen organisasi adalah suatu keinginan yang mendasar untuk pegawai tanpa terkecuali artinya untuk semua bidang yang ada didalam organisasi serta komitmen organisasi adalah gambaran perasaan yang dirasakan oleh seorang pegawai terhadap tempat pegawai bekerja.

Pother (2018:16) yang menjelaskan bahwa suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi yang dapat mempunyai tujuan untuk dapat memberikan segala usahanya demi kejayaan suatu organisasi yang bersangkutan. Dari pengutipan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai yang bekerja disuatu organisasi dan mendapatkan haknya sebagai pegawai akan lebih terbuka atas perasaannya dan akan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya.

Sopiah (2019:15) mendeskripsikan bahwa komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan

loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang diungkapkan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Menurut pengutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mempunyai komitmen kerja didalam organisasi akan cenderung bersikap positif serta bersifat positif terhadap sesuatu masalah atau pekerjaan didalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pengutipan dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa definisi komitmen organisasi adalah kemampuan pada pegawai dalam melibatkan dirinya dengan kualitas, peraturan, tujuan organisasi, menangkup unsur loyalitas terhadap organisasi, serta keterlibatannya dalam sebuah pekerjaan. Pegawai akan mematuhi aturan-aturan yang ada didalam perusahaan tempat pegawai mengabdikan ilmunya agar ilmunya bermamfaat bagi berjalannya kegiatan organisasi, pegawai juga melibatkan dirinya didalam organisasi atas segala pekerjaan sampai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Apabila pegawai menunjukkan sikapnya atas senang atau tidaknya bekerja didalam organisasi tersebut akan mendapatkan apa yang semestinya pegawai dapatkan begitu juga sebaliknya apabila pegawai menunjukkan ketidaksenangannya bekerja didalam organisasi tersebut maka pegawai juga perlu berpikir ulang untuk melanjutkan kesetiaannya didalam organisasi itu.

2.1.10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Fakor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi atau komitmen pegawai yaitu terletak pada diri pegawai tersebut atau komitmen pegawai timbul

dari dalam jiwa pegawai tersebut dan di lakukan lewat perilaku pegawai yang positif ataupun negatif di organisasi.

Komitmen pegawai terhadap organisasi tidak terjadi sebegitu saja, namun melalui jalan yang begitu panjang serta bertahap. Komitmen pegawai pada suatu organisasi juga dipastikan oleh beberapa faktor. Dikutip dari Steers (2018:16) mendeskripsikan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi komitmen pegawai pada suatu organisasi yaitu:

1. Ciri pribadi kerja, tercantum dalam masa jabatan pegawai dalam organisasi, dan ragam kebutuhan serta keinginan yang bertentangan dari tiap pegawai.
2. Ciri pekerjaan, sebagai pengenalan tugas serta kesempatan berkomunikasi dengan rekan kerja.
3. Pengalaman kerja, sebagai keterjaminan organisasi dimasa lalu serta tatacara pegawai lain dalam menyampaikan dan mendiskusikan perasaannya dalam mengenal organisasi.

2.1.11. Indikator Komitmen Organisasi

Menurut Mowday et.al (2009) dalam Fitri (2020) mengemukakan adanya tiga bentuk komitmen organisasi yaitu:

1. Penerimaan terhadap tujuan Organisasi
2. Keinginan untuk bekerja keras
3. Hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi

2.1.12. Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan (*fraud*) menurut Zulkarnain (2018) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi

dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen sehingga membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen (Zulkarnain, 2018).

Menurut Wilopo (2017), umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi.

Kusumastuti (2019) menjelaskan kecurangan adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan. Kurniawati (2017) menjelaskan kecurangan adalah penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi adalah alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian pelaporan keuangan yang palsu sehingga merugikan keuangan perusahaan atau keuangan Negara.

2.1.13. Indikator Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Wilopo (2006:44) dalam Fitri (2020) membagi indikator kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam lima tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya
2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan
3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak terima
5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan atau pihak lain

2.1.14. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. BUMDes harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain, BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan

usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa (Putra, Surya, 2015).

Di sisi lain, menurut Purnomo dan Tim Infest (2016) pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip-Prinsip BUMDes tersebut merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya
2. BUMDes bersifat sosial (*social entrepreneurship*), tidak semata-mata mencari keuntungan.

3. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen, Pengelola/pengurus tidak boleh berasal dari unsur pemerintahan desa. Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat *ex officio* akan dijabat oleh Kepala Desa.
4. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUMDes mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Salah satu tujuan utama BUMDes adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, perlu dihindari pemilihan usaha BUMDes yang sekiranya justru akan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Misalnya, unit usaha BUMDes sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa (Putra Surya, 2015).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pada penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan penegakan hukum.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Septiningsih dan Anwar (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pemerintah Daerah: Peran	Variabel independen terdiri dari : keefektifan pengendalian internal, kesesuaian	Regrsi linier berganda dengan <i>Path Analysis</i>	keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap fraud. Sedangkan perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap

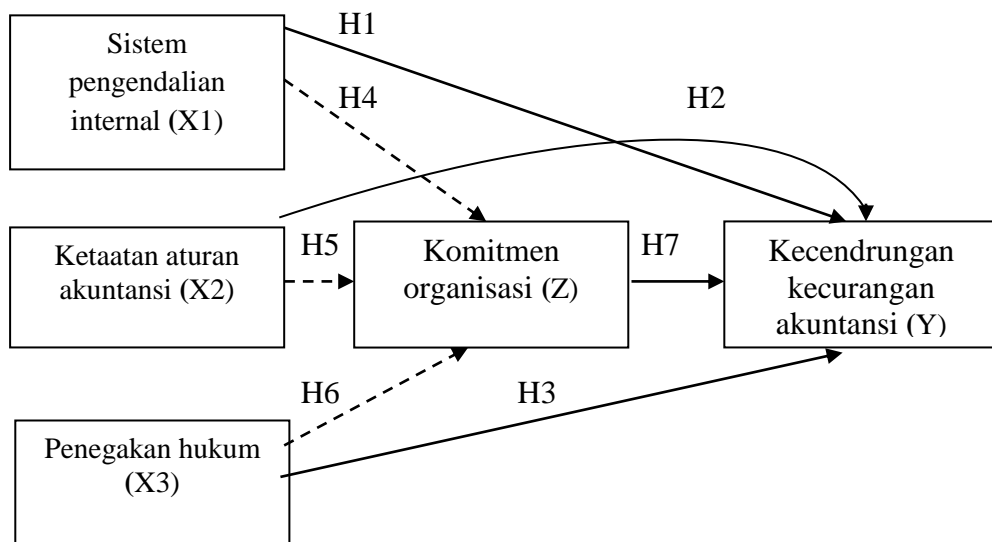
	Intervening Perilaku Tidak Etis	kompensasi, Asimetri informasi dan moralitas individu 2. Variabel dependen adalah fraud 3. Variabel intervening adalah perilaku tidak etis		fraud. Kemudian keefektifan pengendalian internal dan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis
Admadja (2017)	Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel independen: Kompetensi (X1), sistem pengendalian internal (X2) variabel dependen pencegahan <i>fraud</i> (Y) variabel moderasi: moralitas	SEM PLS	Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i>
Fitri (2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening	1. Variabel independen terdiri dari : Sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan Perilaku tidak etis 2. Variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi 3. Variabel intervening adalah komitmen organisasi	SEM PLS	Sistem pengendalian intern pemerintah, berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Komitmen organisasi merupakan variabel intervening antara sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kecurangan akuntansi, Komitmen organisasi bukan merupakan variabel intervening antar perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Hijratul Aswad, Amir Hasan & Novita Indrawati (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan keefektifan pengendalian internal sebagai variabel moderasi (Studi pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta di Provinsi Riau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen terdiri dari : Asimetri informasi, kepatuhan terhadap aturan akuntansi, kompensasi kepatuhan, 2. Variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi, efektivitas 3. pemoderasi pengendalian internal 	SEM PLS	Informasi asimetri memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. kepatuhan terhadap aturan akuntansi dan kompensasi kepatuhan memiliki efek negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan efektivitas pengendalian internal memoderasi pengaruh positif asimetri informasi dan pengaruh negatif kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi efektivitas pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh negatif dari kepatuhan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Yustiana Djaelani dan Zainuddin (2019) Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan P-ISSN 2686-4940 Manajemen Multiparadigma	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen terdiri dari : pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, budaya organisasi dan moralitas manajemen 2. Variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi, 	Regrsi linier berganda	1) pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; 2). ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; 3). budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan; 4) moralitas manajemen Tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
Desak Made Sri Agustini dan Ida Bagus Putra Astika	<i>The effect of effectiveness of internal control and organizationa</i>	1. Variabel independen terdiri dari : pengendalian internal,	Regrsi linier berganda	pengendalian internal yang efektif dan keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

(2021) American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), Volume-5, Issue-8, pp- 168-176	<i>l justice on the accounting fraud tendencies</i>	keadilan organisasi 2. Variabel dependen kecenderungan kecurangan akuntansi,		akuntansi
---	---	--	--	-----------

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal (X1), ketaatan aturan akuntansi (X2) dan penegakan hukum (X3). Sedangkan variabel terikatnya adalah kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) sea variabel komitmen organisasi sebagai inebvening. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dengan menetapkan prosedur dan kebijakan yang ketat, pemisahan tugas yang memadai, serta pengawasan dan pemantauan yang memadai. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) juga dapat membantu menciptakan budaya etika dan integritas yang kuat, sehingga mengurangi risiko rasionalisasi kecurangan oleh individu. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang kuat dan tata kelola yang baik dapat secara efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDes. Menurut Susanto (2015:8), pengendalian intern yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Sejalan dengan pendapat itu, Wilopo (2016:45) menyebutkan bahwa pengendalian intern sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk

mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan adalah ketaatan aturan akuntansi. Menurut Rahmawati (2018) laporan keuangan yang tidak sesuai ataupun yang tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku dapat menimbulkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Menurut Alpinista (2013), Persepsi pegawai terhadap ketaatan aturan akuntansi akan berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Sedangkan penelitian Kusumastuti (2012) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara faktor ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3. Pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah penegakan hukum. Muammar dan Fauziah (2017), menyatakan bahwa tingkat penegakan hukum yang tinggi akan menyebabkan semakin kecil kemungkinan pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang

merugikan organisasi, namun sebaliknya penegakan hukum rendah mengakibatkan pegawai tersebut cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian Muammar dan Fauziah (2017) menyimpulkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan Rifqi (2013) dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi di sector pemerintahan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Penegakan hukum memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

4. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai intervening

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dijelaskan dengan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Salah satu faktor dalam fraud triangle adalah peluang (*opportunity*), yang dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Namun, efektivitas sistem pengendalian internal juga bergantung pada komitmen organisasi dari setiap anggota organisasi tersebut. Teori komitmen organisasi yang dikemukakan oleh John P. Meyer dan Natalie J. Allen menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan keadaan psikologis yang mengikat individu dengan organisasi, sehingga mengurangi keinginan untuk melakukan tindakan yang merugikan organisasi, seperti kecurangan akuntansi. Dengan demikian, komitmen organisasi dapat menjadi mediator yang memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal dalam mengurangi kecenderungan

kecurangan akuntansi. Ketika setiap anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, mereka akan lebih patuh terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Pengendalian internal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai intervening.

5. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening

Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijelaskan melalui Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi aturan dan hukum yang berlaku untuk menghindari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Dalam konteks akuntansi, ketaatan terhadap aturan akuntansi yang berlaku dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi karena individu menyadari risiko yang akan dihadapi jika melanggar aturan tersebut. Namun, pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dimediasi oleh komitmen organisasi. Teori Komitmen Organisasi yang dikemukakan oleh John P. Meyer dan Natalie J. Allen menyatakan bahwa individu dengan komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung berperilaku sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Dengan demikian, ketika anggota BUMDes memiliki komitmen organisasi yang kuat,

mereka akan lebih patuh terhadap aturan akuntansi yang berlaku karena mereka menginternalisasi nilai-nilai organisasi tersebut, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai pemediasi.

6. Pengaruh penegakan hukum terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening

Pengaruh penegakan hukum terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijelaskan melalui Teori Pengendali Keputusan (*Deterrence Decision Theory*). Teori ini menyatakan bahwa individu akan menimbang risiko dan manfaat dari suatu tindakan sebelum mengambil keputusan untuk melakukannya atau tidak. Penegakan hukum yang kuat dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh individu jika melakukan kecurangan akuntansi, sehingga dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk melakukannya. Namun, pengaruh penegakan hukum terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi dapat dimediasi oleh komitmen organisasi. Teori Komitmen Organisasi yang dikemukakan oleh John P. Meyer dan Natalie J. Allen menjelaskan bahwa individu dengan komitmen organisasi yang tinggi akan lebih mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi, karena mereka memiliki ikatan emosional dan identifikasi yang kuat dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang kuat dapat lebih efektif dalam mengurangi kecendrungan kecurangan akuntansi pada BUMDes ketika

anggotanya memiliki komitmen organisasi yang tinggi, karena mereka tidak hanya menghindari risiko hukuman semata, tetapi juga termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Penegakan hukum memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan komitmen organisasi sebagai pemediasi.

7. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Komitmen organisasi mampu mempengaruhi setiap individu untuk memiliki komitmen pada dirinya untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, sehingga adanya komitmen yang tinggi dalam setiap pegawai untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan perilaku etis yang dapat mengurangi kecurangan akuntansi (Kurniawan, 2018). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₇ : Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Rambah sebanyak 14 BUMDesa dengan fokus penelitian sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan komitmen organisasi serta kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Rambah.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih atau lebih singkatnya penelitian ini merupakan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya (Setyosari, 2018:23).

3.3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:12), populasi adalah himpunan semua anggota yang ada didalam suatu penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh BUMDesa yang ada di Kecamatan Rambah sebanyak 14 desa seperti terlihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Desa Yang Memiliki BUMDesa di Kecamatan Rambah

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Rambah Tengah Utara	8.	Sialang Jaya
2.	Rambah Tengah Hilir	9.	Tanjung Belit
3.	Rambah Tengah Barat	10.	Babussalam
4.	Rambah Tengah Hulu	11.	Pematang Berangan
5.	Pasir Maju	12.	Koto Tinggi
6.	Menaming	13.	Suka Maju
7.	Pasir Baru	14.	Kelurahan Pasir Pengaraian

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2023

2. Sampel

Tehnik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017:12). Adapun kriteria sampel yaitu orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana BUMDesa seperti Kepala desa, bendahaa desa kaurr keuangan, bendahara dan ketua di BUMDesa Kecamatan Rambah. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 orang ($14 \times 4 = 56$ orang).

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data lain yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih berupa respon tertulis dan lisan sebagai tanggapan atas wawancara dan kuesionre yang diajukan oleh peneliti

kepada pihak terkait. Serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari desa dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada BUMDesa di desa Kecamatan Rambah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner menurut Sugiyono (2017:12) merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen terdiri dari:

a. Sistem pengendalian internal (X1)

Adalah kontrol didalam suatu organisasi yang bertujuan mengarahkan dan mengawasi sumber daya organisasi yang diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

b. Ketaatan aturan akuntansi (X2)

Adalah suatu kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya dalam organisasi.

c. Penegakan hukum (X3)

Adalah suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Variabel dependen adalah kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)

Adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan..

3. Variabel mediasi adalah komitmen organisasi

Yaitu sebagai suatu daya yang relatif dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang pegawai terhadap suatu organisasi.

Tabel 3. 2 Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Sistem pengendalian internal (X1)	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008) dalam Fitri (2020) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan
2.	Ketaatan aturan akuntansi (X2)	Thoyibatun, 2009 dalam Fitri (2020) 1. Persyaratan pengungkapan 2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan public 3. Objektif 4. Memenuhi syarat kehati-hatian 5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian
3.	Penegakan hukum (X3)	Rifqi, 2013) dalam Fitri (2020) 1. Ketaatan terhadap perundang-undangan 2. Proses penegakan hukum 3. Tanggung jawab

No	Variabel	Indikator
4.	kecendrungan kecurangan akuntansi (Y)	<p>Wilopo (2006:44) dalam Fitri (2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. 2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan 3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja 4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak terima 5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan atau pihak lain
5.	komitmen organisasi (Z)	<p>Mowday et.al (2009) dalam Fitri (2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan terhadap tujuan Organisasi 2. Keinginan untuk bekerja keras 3. Hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi.

3.7. Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Deskriptif

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2017:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selain itu Sugiyono (2017:206) berpendapat yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

3.7.2 Analisis Persamaan Struktural

Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM adalah teknikanalisis statistik yang digunakan untuk menyelesaikan pola hubungan analisis jalur antara variabel laten dengan indikatornya, variable laten dan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Analisis menggunakan SEM dapat dilakukan tiga analisis sekaligus, yaitu analisis faktor, model struktural dan analisis jalur.

Alat analisa yang penulis digunakan dalam metode ini adalah *software Partial Least Square* (Smart PLS) adalah sebuah alat analisa yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement*

model) atau outer model dan model struktural (*structural model*) atau inner model. (Ghozali 2014:7)

1. Uji Model Pengukuran atau Outer Model

Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Evaluasi model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (*MultiTrait-MultiMethod*) dengan menguji *validity convergent* dan *discriminant*. Uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (Ghozali & Latan, 2017:45).

a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstruksinya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2017:45).

b. Discriminant Validity

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator dengan konstruksinya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar

kuadrat dari *average variance extracted* (\sqrt{AVE}) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dengan model. Model dikatakan mempunyai *discriminant validity* yang cukup baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Ghozali, 2014:56). Model dikatakan baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50.

c. Reliability

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015:45).

2. Uji Model Struktural atau *Inner Model*

Model struktural atau *inner model* menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada *substantive theory* dilakukan dengan *R-Square*. Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit* model. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen

tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1).

1. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis antar konstruk yaitu konstruk eksogen terhadap konstruk endogen dan konstruk endogen terhadap konstruk endogen dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser (Ghozali, 2014:46). Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, penerapan metode resampling memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar. Pengujian hipotesis menggunakan analisis *full model Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan smart PLS. Dalam full model SEM dengan PLS selain memprediksi model, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, Sugiyono (2014:123):

- a. Membuat rumusan hipotesis, yaitu:
 - $H_0 = 0$, Artinya variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel dependen.
 - $H_a \neq 0$, Artinya variabel bebas berpengaruh pada variabel dependen.
- b. Menentukan kriteria dan membuat kesimpulan berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yaitu:
 - a) Jika taraf signifikan $\leq 0,05$ H_0 diterima
 - b) Jika taraf signifikan $\geq 0,05$ H_0 ditolak